



SALINAN

**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan strategi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang memuat arah kebijakan dan strategi yang bersifat operasional dan implementasi serta terukur pada setiap triwulannya, melalui Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/1254/XI/Sosbud-Pem/Bappeda-2018 tanggal 16 November 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2019, maka Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pegasusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
 5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pegasusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 Nomor 123) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2019
BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

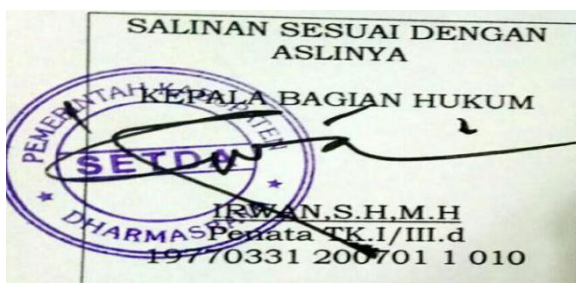
diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH,

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019 NOMOR 2



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG : Perubahan atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 121 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Dharmasraya

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--|--|--------------------------|---|--|---|-------------|---|
| PENGUATAN KELEMBAGAAN PUG | | | | | | | |
| Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah | | | | | | | |
| Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarus-utamaan Gender (Pokja PUG) Kabupaten | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Seluruh Perangkat Daerah | Terbentuknya wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah | Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten | B03 : | | B03 : |
| | | | | | 1. Permintaan Nama Tim/ Personel Anggota Pokja PUG kepada Perangkat Daerah | | 1. Scan surat permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG kepada Perangkat Daerah |
| | | | | | 2. Penyusunan dan Penetapan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten | | 2. Scan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja PUG Kabupaten |
| | | | | | B06: - | | B06: - |
| B09: - | B09: - | | | | | | |
| B12: - | B12: - | | | | | | |
| Pembentukan <i>Focal Point</i> pada seluruh Perangkat Daerah | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Seluruh Perangkat Daerah | Terlaksananya Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah | Ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah | B03: | | B03: |
| | | | | | Penyusunan dan penetapan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di masing-masing Perangkat Daerah | | Scan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Anggota <i>Focal Point</i> di masing-masing Perangkat Daerah |
| | | | | | B06: - | | B06: - |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--|--|--------------------------|--|--|---|-------------|---|
| | | | | | B09: - | | B09: - |
| | | | | | B12: - | | B12: - |
| Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Seluruh Perangkat Daerah | Terwujudnya Pola Kerja Pokja PUG yang aktif, terukur dan terjadwal dengan baik | Ditetapkannya Program Kerja Tahunan | B03: Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten | | B03: Scan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten yang ditandatangani oleh minimal Ketua Pokja PUG |
| | | | | | B06: - | | B06: - |
| | | | | | B09: - | | B09: - |
| | | | | | B12: - | | B12: - |
| SOSIALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER | | | | | | | |
| Terimplementasinya Pengarusutamaan Gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah | | | | | | | |
| Sosialisasi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh Perangkat Daerah | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Seluruh Perangkat Daerah | Perangkat Daerah memahami strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi | 1. Terlaksananya sosialisasi pengarusutamaan gender pada seluruh Perangkat Daerah dan Nagari 2. Tersusunnya Laporan kerja tahunan Pokja PUG Kabupaten | B03: 1. Penyusunan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG 2. Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh anggota Pokja PUG dan Anggota <i>Focal Point</i> | | B03: 1. Scan konsep promosi dan fasilitasi pengarusutamaan gender oleh Ketua dan Sekretaris Pokja PUG dapat berupa TOR atau KAK sosialisasi 2. Scan bukti pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi |
| | | | | | B06: Sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Kecamatan dan Nagari | | B06: Scan bukti sosialisasi yang dilakukan antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|---|--|--------------------------|---|---|--|-------------|--|
| | | | | | B09: Penyusunan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten | | B09: Scan Laporan Kerja Tahunan Pokja PUG Kabupaten terkait dengan pelaksanaan sosialisasi |
| | | | | | B12: - | | B12: - |
| IMPLEMENTASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG) | | | | | | | |
| Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan guna Mewujudkan Kesetaraan Gender di Berbagai Bidang Pembangunan di Daerah | | | | | | | |
| Pembentukan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Seluruh Perangkat Daerah | Terwujudnya pelaksanaan perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Kabupaten | Meningkatnya kapasitas Ti Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten | B03: 1. Permintaan Nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Penyusunan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 3. Ditetapkannya Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten dengan Keputusan Bupati 4. Sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) | | B03: 1. Scan surat permintaan nama Personel Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG dari Perangkat Daerah 2. Scan rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG (yang telah dikoreksi oleh Bagian Hukum) 3. Scan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten 4. Scan bukti sosialisasi pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/ <i>Driver</i> PPRG Kabupaten yang dipimpin oleh Pelaksana Harian (Asisten Bidang Kesra) antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|-------------|---|
| | | | | | 5. Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG Kabupaten | | 5. Scan bukti pelaksanaan pelatihan Tim Penggerak/ Driver PPRG Kabupaten antara lain undangan, absensi, notulen dan dokumentasi |
| | | | | | B06: - | | B06: - |
| | | | | | B09: - | | B09: - |
| | | | | | B12: - | | B12: - |
| Publikasi Profil Gender Kabupaten setiap tahunnya | Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana | Dinas Kominfo, Bagian Humas | Tersedianya data yang terpilah antara laki-laki dan perempuan dalam dokumen data daerah | Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten pada website daerah | B03: 1. Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya (2018) pada website Pemerintah Daerah 2. Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019 | | B03: 1. Scan link Profil Gender Tahun sebelumnya (2018) pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan 2. Scan daftar inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019 |
| | | | | | B06: Pengumpulan data/informasi yang terpilah yang akan dipublikasikan dalam profil gender Kabupaten tahun 2019 | | B06: Scan data/informasi yang terpilah yang telah terkumpul |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | B09: Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten tahun 2019 | | B09: 1. Softcopy Buku Profil Gender Kabupaten 2019 (lengkap) 2. Dokumentasi buku profil gender yang telah tercetak tahun 2019 (tampak depan/cover) |
| | | | | | B12: Dipublikasikannya Profil gender Kabupaten dalam website pemerintah daerah | | B12: Scan link Profil Gender Kabupaten Tahun 2019 pada website pemerintah daerah disertai dengan print screen profil gender yang dipublikasikan |
| Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah Kabupaten | Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah | Seluruh Perangkat Daerah | Terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan | Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA SKPD Kabupaten pada website pemerintah daerah | B03: Pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah | | B03: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan PPRG bagi Anggota <i>Focal Point</i> Perangkat Daerah antara lain : undangan, absensi, notulen dan dokumentasi |
| | | | | | B06: 1. Penelaahan <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) oleh Tim Penggerak PPRG Kabupaten terhadap Rencana Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 2. Penyusunan <i>Gender Budget Statement</i> pada rancangan RKA Tahun 2020 | | B06: 1. Scan dokumen GAP yang telah ditelaah oleh Tim Penggerak PPRG (ditandatangani oleh masing-masing Tim Penggerak PPRG) 2. Scan Gender Budget Statement (yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah) dan dilampirkan dengan RKA |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|---|
| | | | | | <p>3. Publikasi <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) pada RKA SKPD pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Tersedianya menu tagging/penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p> | | <p>3. Scan link <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) dan <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) yang dipublikasikan pada website pemerintah daerah</p> <p>4. Print screen menu tagging kegiatan yang responsif gender pada e-planning</p> |
| | | | | | <p>B09:</p> <p>1. Dilampirkannya GBS OPD yang telah ditelaah dalam Renja OPD Kabupaten Tahun 2020 yang ditetapkan dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah</p> <p>2. Terinventarisasinya kegiatan Perangkat Daerah yang Responsif Gender berdasarkan hasil tagging pada menu e-planning</p> | | <p>B09:</p> <p>1. Scan dokumen seluruh Renja OPD Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah dengan lampiran GBS</p> <p>2. Rekapitulasi kegiatan perangkat daerah berdasarkan hasil tagging pada e-planning (yang terdiri dari nama program, indikator kinerja program, nama kegiatan, output kegiatan, jumlah pagu)</p> |
| | | | | | <p>B12:</p> <p>1. Dilampirkannya GAP dan GBS yang telah ditelaah dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2020</p> | | <p>B12:</p> <p>1. Scan dokumen GAP dan GBS yang telah ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Tahun 2020</p> |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--|--|--------------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | 2. Tersedianya menu tagging/penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Terinventarisasinya kegiatan Perangkat Daerah yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting 4. Penyusunan Laporan Pelaksanaan PPRG | | 2. Print screen menu tagging kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting 3. Rekapitulasi kegiatan perangkat daerah yang telah responsif gender berdasarkan hasil tagging pada e-budgeting (yang terdiri dari nama program, Indikator Kinerja Program, Nama Kegiatan, Output Kegiatan, Jumlah Pagu) 4. Scan Laporan Pelaksanaan PPRG |
| OPTIMALISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG | | | | | | | |
| Terwujudnya kebijakan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan sesuai dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi dan tepat sasaran | | | | | | | |
| Pemantauan pelaksanaan PUG | Badan Perencanaan, penelitian, dan pengembangan Daerah | Seluruh Perangkat Daerah | Tersedianya hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagai bahan perumusan kebijakan | Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati | B03: 1. Penyusunan instrumen pemantauan PUG 2. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I | | B03: 1. Scan instrumen pemantauan PUG yang akan dilakukan pada tahun berkenaan dapat berupa TOR, KAK atau daftar pertanyaan |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|--|
| | | | | | | | 2. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan seluruh Perangkat Daerah triwulan I, dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan I) |
| | | | | | B06: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II | | B06: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan II) |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|--|-------------|---|
| | | | | | <p>B09: Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III</p> | | <p>B09: Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan III)</p> |
| | | | | | <p>B12: 1. Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV</p> | | <p>B12: 1. Scan bukti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV dapat berupa pelaksanaan rapat atau pemantauan ke Perangkat Daerah. Data dukung berupa undangan, notulen/laporan perjalanan dinas, absensi dan dokumentasi (waktu pelaksanaan pada triwulan IV)</p> |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--|------------------|--------------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | 2. Terususunnya rekomendasi kebijakan kepada Bupati melalui Wakil Bupati | | 2. Scan laporan yang ditujukan kepada Bupati melalui Wakil Bupati yang berisikan laporan rekomendasi kebijakan terkait dengan pelaksanaan PUG di daerah |
| Review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah | Inspektorat | Seluruh Perangkat Daerah | Tersedianya hasil review terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah | Tersusunnya laporan hasil review Inspektorat terhadap PPRG di daerah | B03: Penyusunan kegiatan review PPRG dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) | | B03: Scan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) |
| | | | | | B06: Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang PPRG sesuai dengan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah | | B06: Scan bukti pelaksanaan Pelatihan/Bimtek PPRG bagi APIP, antara lain Undangan, Absensi, notulen, dan dokumentasi |
| | | | | | B09: 1. Pembentukan Tim Review PPRG 2. Review PPRG pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 | | B09: 1. Scan Surat Keputusan Inspektur, terkait dengan penetapan Tim Review PPRG Kabupaten 2. Hasil review PPRG pada Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2020 |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|---|------------------|--------------------------|---|---|--|-------------|---|
| | | | | | B12: Laporan pelaksanaan Review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020 | | B12: Scan laporan pelaksanaan Review PPRG untuk Tahun Anggaran 2020 |
| Pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di daerah | Inspektorat | Seluruh Perangkat Daerah | Tersedianya hasil pengawasan terhadap implementasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah | Tersusunnya laporan hasil pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG di Daerah | B03: 1. Penyusunan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah Periode Januari – Maret | | B03: 1. Scan instrumen pengawasan implementasi PPRG 2. Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap implementasi PPRG pada Perangkat Daerah Periode Januari – Maret |
| | | | | | B06: Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode April – Juni | | B06: Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode April – Juni |
| | | | | | B09: Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September | | B09: Scan hasil pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September |
| | | | | | B12: 1. Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September | | B12: 1. Pengawasan Inspektorat terhadap Implementasi PPRG Pada Perangkat Daerah Periode Juli – September |

| RENCANA AKSI | PENANGGUNG JAWAB | INSTANSI TERKAIT | KRITERIA KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN | UKURAN KEBERHASILAN B03, B06, B09, B12 | Capaian (%) | KETERANGAN (DATA DUKUNG) |
|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---|-------------|---|
| | | | | | 2. Tersusunnya rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG Kabupaten yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada Ketua dan Sekretaris Pokja PUG | | 2. Scan laporan yang berisi rekomendasi terkait dengan implementasi PPRG berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat yang disampaikan kepada Bupati melalui Wakil Bupati dan Asisten Pemerintahan dan Kesra selaku Pelaksana Harian, dengan tembusan disampaikan kepada ketua dan sekretaris Pokja PUG |

BUPATI DHARMASRAYA,

dto
SUTAN RISKA